



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I GEDE ARYA SUARDANA
2. Jabatan : KEPALA SATUAN
3. NHK : 431697

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 7.452.750.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m2/192 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/64 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 6030 m2 di KAB / KOTA BULELENG, WARISAN Rp. 3.015.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 2575 m2/400 m2 di KAB / KOTA BULELENG, WARISAN Rp. 2.575.000.000
5. Tanah Seluas 5675 m2 di KAB / KOTA BULELENG, WARISAN Rp. 283.750.000
6. Tanah Seluas 2290 m2 di KAB / KOTA BULELENG, WARISAN Rp. 229.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/10 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 186.500.000

1. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA F1CO2N28LO A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
3. MOBIL, SUZUKI JEEP Tahun 1989, HASIL SENDIRI Rp. 37.500.000



4. MOTOR, HONDA MOTOR MATIC Tahun 2022, HASIL SENDIRI

Rp. 35.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 37.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 57.500.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 7.733.750.000

III. HUTANG

Rp. 375.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 7.358.750.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.